

DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN DI KALIMANTAN TIMUR : SUATU PENDEKATAN MODEL SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI

Oleh
Agus Justianto¹⁾

¹⁾ Saat ini diperbantukan pada Multistakeholder Forestry Programme-DFID, Jakarta

ABSTRACT

The objective of this study is to evaluate the impact of selected forest policies on the incomes of the poor in East Kalimantan. A Social Accounting Matrix Approach of 1995 and 2003 for Kalimantan Timur was developed to analyze linkages among socio-economic factors within the region, including poverty, income distribution, and economic development. Nine policy alternatives for the period 1995-2003 were then simulated using the Model to evaluate which would be most suitable for improving the income of the poor who live in or near forest areas. Based on the comparison of economic performance in Kalimantan Timur before and after the decentralization era (1995 and 2003), the results indicate that the forest sector's contribution to the GDP of Kalimantan Timur decreased after the onset of the decentralization era. The average disposable income of forest households in 1995 and 2003 is the lowest of all household groups. By using poverty mapping, it was found that most of the population living in protection forests are poor, while that living in production forest areas and forest lands intended to be set aside for other purposes is relatively better off. Forestry activities which had the most significant effect in generating income for poor people in Kalimantan Timur were small-scale forest industries of various types. However, in general, forest households did not receive much in the way of benefits from forestry activities and there is a very low multiplier of forestry sector activities for forest households. Small-scale forest industries have provided a better income distribution to all groups of forest households, especially for the poor.

Key words: poverty, economic welfare, income distribution, social accounting matrix, multiplier, policy impact

PENDAHULUAN

Selama tiga dasawarsa terakhir, sejak dimulainya pemanfaatan dan pengusahaan hutan secara komersial dalam skala besar, pengelolaan hutan di Indonesia telah menjadikan hutan sebagai modal utama pembangunan ekonomi nasional yang memberikan dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain kebijakan pembangunan kehutanan telah menimbulkan ekses dan berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan (ekologi).

Kebijakan pemanfaatan hutan alam sampai dengan awal tahun 1990 bertujuan untuk: (1) menghasilkan devisa melalui ekspor kayu bulat yang diproduksi (dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian

yang sedang downturn), (2) menyerap tenaga kerja (pertumbuhan penduduk jauh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi), dan (3) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (ketersediaan investasi untuk pengembangan ekonomi daerah terbatas).

Selama tiga dekade belakangan ini, sumberdaya hutan telah memberikan kontribusi yang relatif signifikan dalam pembangunan di Indonesia, karena sumberdaya hutan merupakan salah satu kekayaan alam (natural capital) yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan aliran pendapatan baik kepada negara maupun masyarakat. Kebijakan pemanfaatan hutan alam telah berhasil meningkatkan devisa, penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Astana dan Erwidodo, 2001). Namun dibalik keberhasilannya, dampak kebijakan

yang diterapkan membawa persoalan baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Akhir-akhir ini, banyak pihak mulai mengkhawatirkan terjadinya penurunan potensi produksi hutan tersebut dan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Bila ditinjau dari cara pemanfaatannya, sumberdaya hutan selama ini, cenderung dimanfaatkan secara berlebihan yang berakibat pada kerusakan atau degradasi sumberdaya hutan itu sendiri. Eksploitasi sumberdaya hutan yang mengarah pada kerusakan hutan terutama disebabkan oleh sistem ekonomi yang berlaku sekarang mendorong perilaku orang-orang ke arah pemungutan rente hutan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan individual. Pada banyak kasus, sumberdaya hutan lebih dianggap sebagai *common resources*, sehingga sumberdaya hutan kurang mendapat perhatian secara wajar dalam arti pemanfaatan untuk kepentingan individu lebih diutamakan daripada kepentingan kelestarian hutan itu sendiri, sehingga peran hutan sebagai sistem penyangga kehidupan (*life supporting system*) terabaikan.

Pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya selama ini dengan sendirinya meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya pasti akan mengancam kecukupan pangan dari penduduk, kondisi pemerataan distribusi pendapatan serta potensi pertumbuhan ekonomi mereka pada masa mendatang. Pemanfaatan sumber daya hutan selama ini, termasuk di Kalimantan Timur, ternyata tidak dinikmati secara proporsional oleh semua kelompok masyarakat. Kepentingan dan hak masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan sering terabaikan, termasuk aksesnya terhadap manfaat hutan, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini menyebabkan kemiskinan tetap menjadi masalah di Kalimantan Timur walaupun pemanfaatan sumber daya alam termasuk hutan telah berlangsung lama.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan di Kalimantan Timur sebagai dampak kebijakan pembangunan kehutanan, dan menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah pada pendapatan

masyarakat miskin di sekitar hutan. Sistem Neraca Sosial Ekonomi yang dibangun secara nyata dapat mencirikan keterkaitan sektor kehutanan dengan sektor-sektor lain. Model tersebut digunakan untuk mensimulasikan pengaruh kebijakan kehutanan terhadap pendapatan masyarakat miskin di sekitar hutan.

METODE PENELITIAN

Kerangka teoritis dibangun dari model SNSE yang bersifat keseimbangan umum (*general equilibrium*) dan dapat menggambarkan perekonomian suatu wilayah dan dapat menghubungkan berbagai aspek sosial dan ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan, seperti kemiskinan, distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi, secara terpadu dan komprehensif. Namun, SNSE tidak menggunakan data *time-series* dalam analisisnya.

Penelitian dilakukan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki aktivitas perekonomian khususnya sektor kehutanan yang cukup lengkap. Analisis dilakukan pada dua tahun kajian yang berbeda yaitu tahun 1995 untuk menganalisis kondisi sebelum otonomi daerah dan tahun 2003 untuk menganalisis kondisi setelah otonomi daerah. Tahapan analisis dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi faktor (*factor share*), analisis efek pengganda dan analisis simulasi. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan khususnya di sekitar kawasan hutan, dilakukan pemetaan Sistem Informasi Geografis Data dengan men-overlaykan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur (2001) dan Peta Penduduk Miskin Indonesia 2000. Data dan informasi dasar diambil dari berbagai sumber, utamanya dari Badan Pusat Statistik pada periode tahun 1995-2003, sedangkan untuk simulasi model digunakan data dalam periode tahun 2003.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Ekonomi Kalimantan Timur Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

PDRB Kalimantan Timur tahun 1995 adalah sebesar Rp. 21.79 triliun sedangkan PDRB tahun 2003 adalah Rp. 110.25 triliun. Hal ini berarti terdapat perkembangan PDRB yang cukup besar dari tahun 1995 sampai 2003,

dari sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah. Dalam pembentukan PDRB di Kalimantan Timur dapat diketahui bahwa sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar kepada PDRB Kalimantan Timur pada tahun 1995 yaitu sebesar 27.61%. Namun, pada tahun 2003 sektor industri migas yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 32.41%. Diantara sektor kehutanan yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 1995 adalah kegiatan kayu hasil hutan alam dan diikuti oleh industri kayu lapis dan sejenisnya, yaitu 5.15% dan 4.70%, namun pada tahun 2003 menurun menjadi 2.24% dan 1.63%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kalimantan Timur semakin menurun setelah otonomi daerah.

Hasil kegiatan sektor kehutanan pada tahun 1995 paling banyak dinikmati oleh tenaga kerja kehutanan penerima upah dan gaji dari kegiatan yang memproduksi kayu hasil hutan alam yaitu sebesar Rp. 80 367 juta. Namun, pada tahun 2003 atau sesudah otonomi daerah, distribusi terbesar diterima oleh tenaga kerja kehutanan bukan penerima upah dan gaji yaitu sebesar Rp 223 104 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kehutanan sesudah otonomi daerah sudah dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada tenaga kerja yang tidak secara langsung terkait dengan kegiatan primernya.

Distribusi pendapatan disposabel per kapita Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pendapatan disposabel per kapita di Kalimantan Timur rata-rata pada tahun 1995 adalah sebesar Rp. 1 451 700 per tahun, sedangkan tahun 2003 menjadi Rp. 10 384 100 per tahun. Rata-rata pendapatan disposabel rumah tangga kehutanan pada tahun 1995 dan 2003 baik untuk golongan rendah, menengah, dan atas ternyata paling rendah dibandingkan dengan golongan rumah tangga lain dengan pendapatan rumah tangga bukan pertanian golongan atas merupakan rumah tangga dengan pendapatan disposabel tertinggi yaitu Rp. 32 341 100 per kapita per tahun pada tahun 1995 dan Rp. 240 982 600 per kapita per tahun pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan ternyata belum mampu memberikan pendapatan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang berada di dalam di sekitar hutan,

walaupun sudah ada peningkatan dalam distribusinya pada periode sesudah otonomi daerah.

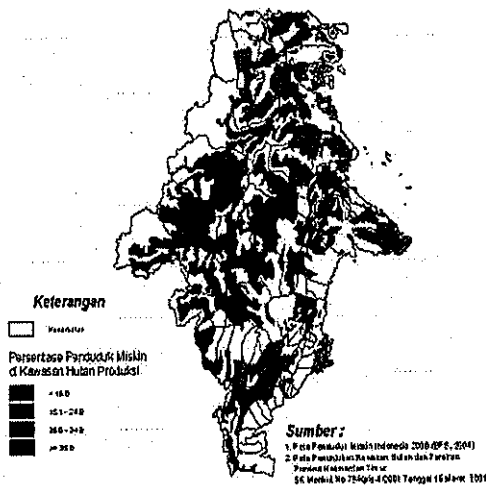
Kondisi dan Pemetaan Kemiskinan di Kalimantan Timur

Berdasarkan perkembangannya, selama periode 1998-1999 jumlah penduduk miskin Kalimantan Timur mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 48.5%, yaitu dari 779 415 orang pada tahun 1998 menjadi 401 760 pada tahun 1999 (Gambar 9). Hal ini menunjukkan bahwa pasca krisis ekonomi, pembangunan ekonomi telah menggeliat kembali dan memberikan dampak dalam pengurangan jumlah penduduk miskin dengan jumlah cukup signifikan. Namun pada tahun 2000 mengalami lonjakan sebesar 32.6% lagi hingga menjadi 532 751 orang. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin Kalimantan Timur mengalami penurunan kembali pada tahun 2001, hingga relatif stabil sampai tahun 2004 yang berjumlah 318 200 orang.

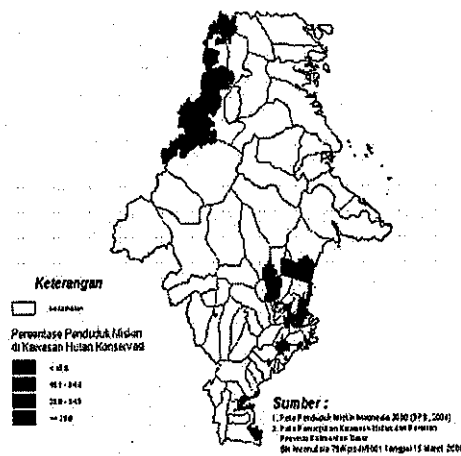
Berdasarkan pemetaan kemiskinan pada kawasan hutan di Kalimantan Timur, dapat diketahui bahwa sebagian besar kawasan hutan lindung ternyata mempunyai persentase penduduk miskin lebih besar dari 25%, sedangkan persentase kemiskinan pada wilayah yang berada di sekitar kawasan konservasi sebagian besar kurang dari 15%. Selanjutnya, lebih dari setengah wilayah kawasan hutan produksi di Kalimantan Timur ternyata persentase penduduk miskinnya kurang dari 15% dan hanya sedikit sekali yang mempunyai persentase penduduk miskin lebih dari 35%, sedangkan sebagian besar kawasan areal penggunaan lain mempunyai persentase penduduk miskinnya kurang dari 15% yang tersebar merata pada kawasan tersebut. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan Kalimantan Timur ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten yang penduduknya umumnya tinggal di perdesaan dan dekat sumberdaya alam yang cukup melimpah.

Kondisi kemiskinan yang terjadi di kawasan hutan lindung perlu diberi perhatian lebih lanjut, karena hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan masyarakat miskin setempat dalam mengeksploitasi hutan secara ilegal. Sedangkan kegiatan sektor kehutanan pada

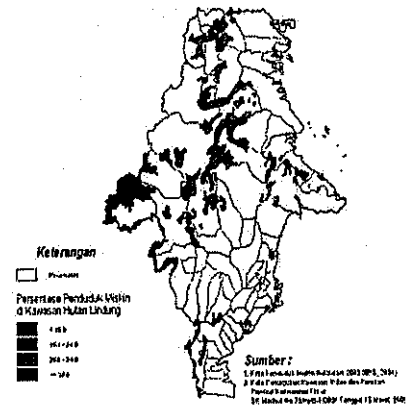
kawasan hutan produksi dan areal penggunaan lain mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya, namun ada kecenderungan penurunan aktivitas sektor kehutanan sebagai akibat berkurangnya sumber bahan baku yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang.



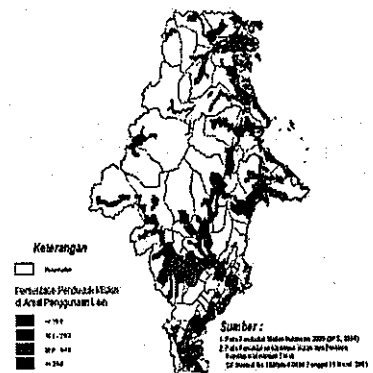
Persentase Penduduk Miskin di Kawasan Hutan Lindung Propinsi Kalimantan Timur



Persentase Penduduk Miskin di Kawasan Hutan Konservasi Propinsi Kalimantan Timur



Persentase Penduduk Miskin di Kawasan Hutan Produksi Propinsi Kalimantan Timur



Persentase Penduduk Miskin di Areal Penggunaan Lain Propinsi Kalimantan Timur

Kegiatan Sektor Kehutanan Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan

Dari kegiatan-kegiatan sektor kehutanan di Kalimantan Timur, ternyata kegiatan industri barang-barang lainnya dari kayu yang mempunyai pengaruh paling besar dalam memberikan pendapatan pada semua golongan rumah tangga kehutanan terutama golongan rendah dengan besaran multipliernya terhadap pendapatan rumah tangga golongan rendah (miskin) adalah sebesar 0.0372, diikuti dengan industri bubur kertas dan kegiatan memproduksi kayu hasil hutan alam. Sedangkan yang mempunyai pengaruh paling kecil terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan miskin adalah kegiatan industri kayu gergajian dan awetan, dan kegiatan industri bahan bangunan dari kayu.

Lebih lanjut, rumah tangga kehutanan semua golongan ternyata tidak banyak menikmati hasil dari kegiatan-kegiatan sektor kehutanan. Jika diambil rata-ratanya, besaran multiplier sektor kehutanan terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan golongan rendah yang dapat disebut sebagai masyarakat miskin hanya sebesar 0.007. Dengan kata lain, setiap terjadi perubahan pendapatan pada sektor kehutanan sebesar 1 milyar rupiah, maka pendapatan dari masyarakat miskin kehutanan hanya meningkat 0.007 milyar rupiah atau 7 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan rumah tangga lain seperti pertanian selain kehutanan dan bukan pertanian, maka rumah tangga kehutanan yang paling sedikit menikmati hasilnya.

Industri barang-barang lainnya dari hasil hutan dapat dianggap sebagai industri skala kecil yang umumnya berada di daerah perdesaan seperti pembuatan furnitur, kerajinan kayu, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah untuk dikembangkan lebih lanjut karena mampu memberikan pengaruh yang paling besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin kehutanan dibandingkan dengan kegiatan sektor kehutanan lainnya.

Implikasi Kegiatan Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin

Rumah tangga kehutanan semua golongan ternyata tidak banyak menikmati hasil dari kegiatan-kegiatan sektor kehutanan. Jika diambil rata-ratanya, besaran multiplier sektor kehutanan terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan golongan rendah yang dapat disebut sebagai masyarakat miskin hanya sebesar 0.007. Dengan kata lain, setiap terjadi perubahan pendapatan pada sektor kehutanan sebesar 1 milyar rupiah, maka pendapatan dari masyarakat miskin kehutanan hanya meningkat 0.007 milyar rupiah atau 7 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin golongan lain seperti rumah tangga pertanian selain kehutanan dan rumah tangga bukan pertanian, maka rumah tangga miskin kehutanan menerima dampak yang paling kecil.

Temuan semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena terdapat indikasi bahwa posisi masyarakat miskin di dalam dan di sekitar kawasan hutan selama ini tidak diuntungkan oleh kegiatan-kegiatan sektor kehutanan. Meskipun

mereka sebenarnya sebagai tulang punggung pembangunan sektor kehutanan, namun hasilnya ternyata lebih banyak dipetik oleh rumah tangga lain selain kehutanan. Kondisi menunjukkan bagaimana lemahnya masyarakat miskin kehutanan dalam memperoleh posisi tawar yang lebih baik, sehingga selalu mendapat tekanan dari institusi-institusi ekonomi lainnya yang lebih kuat.

Penyebab utama dari kemiskinan masyarakat di sekitar hutan adalah kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat mengelola sumber daya hutan dengan baik apalagi menikmati hasilnya secara wajar. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dapat dilakukan dengan menyediakan kegiatan ekonomi (bisnis) untuk kelompok masyarakat miskin tersebut, dengan hutan sebagai 'lahan' bisnis utama (Nasution, 2005).

Dampak Skenario Kebijakan Sektor Kehutanan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan analisis dari aspek pendapatan masyarakat, maka skenario kebijakan yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap pendapatan masyarakat miskin kehutanan (rumah tangga kehutanan golongan rendah) setelah diberikan shock adalah skenario 1 yaitu pengurangan produksi tahunan hutan alam sebesar 50% dan skenario 7 yaitu larangan ekspor kayu bulat dengan nilai perubahan sebesar 28.36% dan 21.88%. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan masih sangat bergantung pada kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan alam yang dilakukan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Ijin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Lebih lanjut, pengaruh kebijakan kehutanan terhadap masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan yang terkait dengan aktifitas industri kehutanan ternyata relatif kecil, seperti shock melalui kebijakan pengurangan kapasitas industri kayu lapis menyebabkan pengurangan pendapatan masyarakat miskin sebesar 4.69%. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat miskin yang tinggal di sekitar kawasan hutan umumnya tidak banyak terlibat dalam industri kehutanan terutama yang berskala besar, sedangkan

industri kehutanan skala kecil yang berbasis pedesaan memang belum banyak dikembangkan.

Dari hasil analisis dampak pengganda neraca, dapat diketahui bahwa skenario kebijakan transfer pengeluaran pemerintah (melalui Dana Reboisasi) untuk pembangunan hutan tanaman sebesar 20% mempunyai dampak pengganda yang paling besar yaitu 1.37%. Kondisi ini dapat dipahami, karena pengeluaran pemerintah melalui Dana Reboisasi selama ini digunakan terutama untuk membiayai kegiatan kehutanan di lapangan yang melibatkan masyarakat setempat secara langsung seperti pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat secara langsung melalui keterlibatannya dalam kegiatan penanaman di lapangan.

Angelsen and Wunder (2003) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menunjukkan bahwa pembangunan kehutanan tidak berpihak kepada masyarakat miskin, sehingga mereka tidak memperoleh banyak manfaat pengolahan kayu, yaitu :

1. Memerlukan modal yang besar, dimana intensitas modal sering meningkat seiring dengan tahapan nilai tambahnya, yaitu pada tahap-tahap pengangkutan, pengolahan dan pemasaran.
2. Memerlukan kemampuan dan teknologi tinggi, yang umumnya jauh melampaui kemampuan dari masyarakat miskin.
3. Skala ekonomi perusahaan hutan biasanya besar, sedangkan masyarakat miskin umumnya hanya berusaha pada skala kecil, kecuali mereka bergabung dalam koperasi.
4. Perusahaan hutan membutuhkan jangka waktu yang lama dan bukan 'cash crops', sedangkan masyarakat miskin umumnya membutuhkan keuntungan segera untuk mempertahankan hidupnya.
5. Kepastian status kepemilikan lahan masyarakat miskin umumnya lemah, sehingga sulit untuk dapat melakukan perusahaan hutan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut Angelsen and Wunder (2003) menyatakan bahwa perusahaan hutan dapat diupayakan untuk

lebih berpihak pada masyarakat miskin yaitu dengan membuka akses yang lebih besar dalam pengelolaan hutan, mengarahkan perusahaan hutan skala kecil dengan jenis-jenis yang cepat tumbuh, dan membangun industri-industri kayu skala kecil. Masyarakat lokal sebagai pihak yang paling memahami kearifan tradisional seharusnya mendapat prioritas dalam mengelola dan memanfaatkan hutan yang ada di sekitarnya. Apabila masyarakat setempat memiliki akses yang lebih besar terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang ada di sekitarnya, maka akan mendorong rasa tanggungjawab untuk menjaga kawasan hutan yang ada di sekitarnya serta menjamin kelestarian hutan dalam pemanfaatannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dan simulasi kebijakan di atas, dapat disimpulkan dampak skenario kebijakan pembangunan kehutanan terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kalimantan Timur dan saran tindak lanjutnya.

Simpulan

1. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan Kalimantan Timur ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten yang penduduknya umumnya tinggal di pedesaan dan dekat sumberdaya alam yang cukup melimpah. Sebagian besar wilayah pada kawasan hutan lindung ternyata penduduknya adalah masyarakat miskin, sedangkan pada kawasan hutan produksi dan areal penggunaan lain hanya sebagian kecil saja yang penduduknya miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian pada sektor kehutanan yang berkaitan dengan produksi kayu dan hasil hutan lainnya mampu mengurangi kemiskinan.
2. Kegiatan sektor kehutanan yang mempunyai pengaruh paling signifikan dalam memberikan pendapatan pada masyarakat miskin di Kalimantan Timur adalah industri barang-barang lainnya dari kayu, diikuti oleh industri bubur kertas dan kegiatan memproduksi kayu hasil hutan alam. Sedangkan yang mempunyai pengaruh paling kecil terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan miskin adalah industri

Tabel 1. Dampak Skenario Kebijakan Pembangunan Kehutanan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kehutanan, Tahun 2003

No	Skenario Kebijakan	Rumah Tangga Kehutanan Gol. Rendah	Rumah Tangga Kehutanan Gol. Menengah	Rumah Tangga Kehutanan Gol. Atas	Jumlah
1.	Pengurangan produksi tahunan hutan alam sebesar 50%	- 8 517 351 (-28.36%)	- 1 562 141 (-10.27%)	- 993 821 (-8.87%)	- 11 073 313
2.	Transfer pengeluaran pemerintah (melalui Dana Reboisasi) untuk pembangunan hutan tanaman sebesar 20%	5 063 (0.02%)	675 (0.00%)	672 (0.01%)	6 950
3.	Pengurangan kapasitas industri kayu lapis sebesar 20%	- 1 410 111 (-4.69%)	- 257 420 (-1.69%)	- 164 547 (-1.47%)	- 1 832 078
4.	Pengurangan kapasitas industri gergajian sebesar 20%	- 117 813 (-0.39%)	- 20 730 (-0.14%)	- 13 828 (-0.12%)	- 152 371
5.	Peningkatan kapasitas industri bubur kertas sebesar 20%	856 993 (2.85%)	155 407 (1.02%)	100 075 (0.89%)	1 112 475
6.	Peningkatan kapasitas industri barang-barang lainnya dari hasil hutan sebesar 20%	41 919 (0.14%)	7 070 (0.05%)	4 942 (0.04%)	53 931
7.	Larangan ekspor kayu bulat (ekspor sebesar 0%)	-6 573 019 (-21.88%)	-1 205 537 (-7.92%)	-766 953 (-6.84%)	-8 545 509
8.	Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk subsidi masyarakat miskin sebesar 20%	26 324 (0.09%)	393 (0.00%)	273 (0.00%)	26 990
9.	Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur sebesar 20%	6 687 (0.02%)	1 064 (0.01%)	782 (0.01%)	8 533

kayu gergajian dan awetan, dan industri bahan bangunan dari kayu.

- Rumah tangga kehutanan semua golongan terutama rumah tangga miskin ternyata tidak banyak menikmati hasil dari kegiatan-kegiatan sektor kehutanan, karena besaran multiplier sektor kehutanan terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan golongan rendah sangat kecil dibandingkan dengan rumah tangga lain seperti pertanian selain kehutanan dan bukan pertanian.
- Hasil simulasi skenario kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan produksi tahunan hutan alam sebesar 50% memberi dampak yang paling besar pada pengurangan pendapatan pekerja kehutanan diikuti dengan kebijakan larangan ekspor kayu bulat.

- Industri kecil barang-barang lainnya dari hasil hutan yang umumnya berada di perdesaan berpotensi besar untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dibandingkan dengan industri skala besar seperti kayu lapis, kayu gergajian, dan bubur kertas.

Saran

- Dampak pemanfaatan hutan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat akan direspon positif oleh masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada kelestarian sumber daya hutan, sehingga pemanfaatan sumber daya hutan untuk kepentingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan harus menjadi tujuan utama dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.

2. Pemanfaatan hutan sebaiknya juga mempertimbangkan adanya imbang rugi (trade off) antara aspek ekonomi dengan aspek ekologi, seperti pendapatan devisa dengan kualitas lingkungan, sehingga pendekatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management) dapat dikembangkan dengan mengharmonisasikan kedua aspek tersebut.
 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan harus diarahkan untuk meningkatkan akses pendanaan masyarakat (baik perbankan maupun lembaga keuangan alternatif lainnya), akses informasi pasar dan introduksi teknologi, akses pembinaan kelembagaan usaha masyarakat serta aspek legal yang mendukung dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam usaha pemanfaatan sumber daya hutan.
 4. Desentralisasi sektor kehutanan seharusnya dilihat sebagai suatu hal yang positif dan merupakan upaya untuk membuat jasa pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 5. Pilihan-pilihan kebijakan kehutanan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan untuk dikembangkan pada masa mendatang agar difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan (1) pengelolaan kawasan hutan, (2) industri kehutanan, (3) pemberdayaan fiskal, (4) penguatan kelembagaan, dan (5) pembangunan infrastruktur.
- Defourny, J. and E. Thorbecke. 1984. Structural Path Analysis and Multiplier Decomposition within a Social Accounting Matrix Framework. *The Economic Journal*, 94(373): 111-136
- Dhanani, S. and I. Islam. 2002. Poverty, Vulnerability and Social Protection in a Period of Crisis : The Case of Indonesia. *World Development* 30(7): 1211-1231.
- Justianto, A. 2002. Pengurangan AAC Secara Bertahap pada Hutan Produksi Alam: Suatu Pilihan Kebijakan. Makalah disajikan pada "Diskusi Penentuan AAC Hutan Produksi Alam Sekunder", Jakarta, Manggala Wanabakti, 21 Februari.
- Justianto, A. 2003. *The Future of Plantation Forests in Indonesia: Its Development in a Transitional Period*. Mimeo, Jakarta.
- Perdana, A.A. 2004. Poverty Alleviation and Social Insurance Policy : Past Lessons and Future Challenges. *The Indonesian Quarterly* 32(3) : 266-272.
- Sadoulet, E. and A. de Janvry. 1995. *Quantitative Development Policy Analysis*. Johns Hopkins, Baltimore and London
- Satari, A.M., H. Siregar et al. 2002. Perumusan Structural Adjustment Programs (SAPs) dan Model Pembangunan Pertanian. Departemen Pertanian dan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, Jakarta.
- Suryahadi, A. and S. Sumarto. 2005. *Poverty Analysis and Mainstreaming in Indonesia*. SMERU Research Institute, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, A and S. Wunder. 2003. Exploring the Forest-Poverty Link : Key Concept, Issues and Research Implications. Occasional Paper No. 40. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Astana, A. dan Erwidodo. 2001. Pemberlakuan Kembali Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat. Laporan Proyek Penelitian Analisis Kebijakan Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan, Bogor.
- Daryanto, A. 2001. *Social Accounting Matrix Model for Development Policy Analysis*. Bogor Agricultural University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Socio-Economics, Bogor.
- Sudradjat, A. 2003. Persepsi Birokrat Tentang Ekonomi Otonomi Bidang Kehutanan (Kasus di Propinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara). Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sumodiningrat, G. 2005. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Makalah Disajikan pada Lokakarya Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Kehutanan. Jakarta, 21 April 2005.
- Sunderlin, W.D. 1998. *Between Danger and Opportunity: Indonesia's Forests in an Era of Economic Crisis and Political Change*. CIFOR, Bogor.